



Newsletter Pusdatin

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

SOSIALISASI PERENCANAAN PENGADAAN MELALUI APLIKASI SiRUP VERSI 2.2



Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan atau lebih dikenal dengan nama SiRUP masih terus dikembangkan untuk kemudahan pengguna baik dalam proses penginputan data dan keterkaitannya dengan aplikasi pelelangan lainnya. Pada akhir tahun 2017, Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan beberapa perubahan dan pengembangan pada aplikasi ini. Agar perubahan dan pengembangan tersebut dapat disebarluaskan ke seluruh pengguna, LKPP mengundang

LPSE Kementerian/Lembaga/Institusi untuk menghadiri Sosialisasi Perencanaan Pengadaan Melalui Aplikasi SiRUP.

Sosialisasi ini dibuka oleh Awan Hermawan selaku Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE. Awan memaparkan mengenai proses reformasi pengadaan dan pembenahan ekosistem pengadaan pada sektor perencanaan melalui aplikasi SiRUP. Bahwa ada empat pilar untuk proses reformasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang saling terkait yaitu pertama, *Legislative*

Tim Redaksi :

Pengarah :

Dr. Ir. Suwandi, M.Si

Penasehat :

Dr. Ir. Leli Nuryati, MS.c

Ir. Bayu Mulyana, MM

Dr. M. Luthful Hakim, SP., MS.i

Dr. Ir. Anna Astrid Susanti, M.Si

Penanggung Jawab :

Andry Polos, S.Kom

Redaktur :

Dhanang Susatyo, SE

Editor :

Hani Hanifah R., S.Kom

Dra. P. Hanny Mulianny, MM

Budi Setiono

Hety Sulistiyowati, ST

Fotografer :

Cahyani Wartianingsih S.Kom

Apriadi Setiawan, S.Kom, MT

Desain Grafis :

Suyati, S.Kom

Sri Lestari, SE

Sekretariat :

Iswadi

Eli David, S.Sos, MM

Musdino

Suparmi

alamat redaksi :

Pusat Data dan Sistem Informasi

Pertanian Jl. Harsono RM No. 3

Gd. D Lantai IV

Pasar Minggu – Jakarta 12550

Telp : 021-7805305, 7816384

Fax : 021-7822638

e-mail :

newsletter@pertanian.go.id

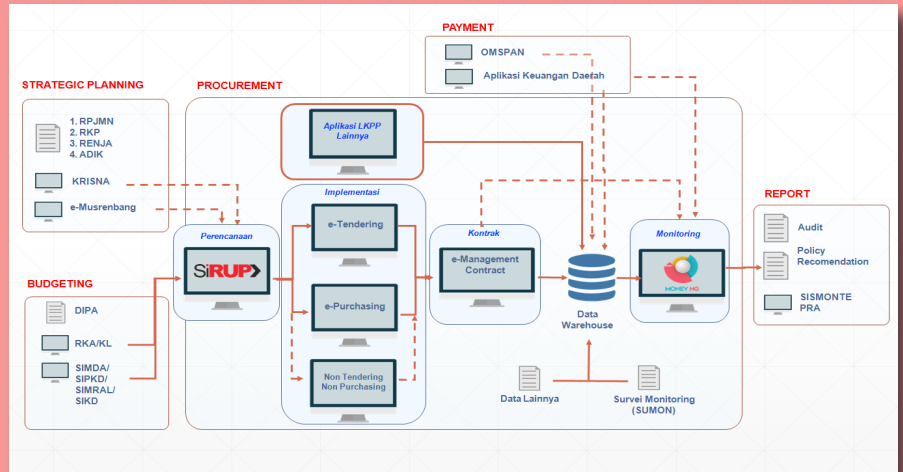
DAFTAR ISI

Sosialisasi Perencanaan Pengadaan Melalui Aplikasi Sirup Versi 2.2	1
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian	3
Menyikapi Dengan Bijak Medsos	5
Workshop Hasil Survei Metode Ubinan Padi Jajar Legowo	6
Workshop Data Dan Informasi Ekonomi Pertanian TAHUN 2017	9
Prospek Kedelai 5 Tahun ke Depan	10

and Regulatory Framework atau peraturan dalam hal ini Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan No.70 Tahun 2012, berbagai Peraturan Kepala LKPP dan Rencana Undang-Undang. Kedua,

Instutional Framework and Management Capacity. Ketiga, *Integrity and Transparancy (Anti Corruption)* dengan cara bersikap profesional disetiap bidang. Keempat, *Procurement Operation and Market Practice* dalam hal ini *Market Practice* bisa didapat melalui kewenangan Pengadaan Langsung, proses *eProcurement* yang terdiri dari *eTendering* dan *ePurchasing* yang didahului oleh SiRUP. Tentu saja selain empat pilar itu harus diperhatikan juga ekosistem pengadaan yang ada. Ada tujuh komponen ekosistem pengadaan yang harus diperbaiki yaitu sistem perencanaan, sistem penganggaran, organisasi, sistem pembayaran, sistem perpajakan, sistem pengendalian dan pengawasan serta masalah yang mungkin akan terdeteksi saat komponen dilakukan proses perbaikan.

Awan melanjutkan, proses membangun perencanaan pengadaan yang terintegrasi tentu saja membutuhkan kerjasama dengan berbagai macam pihak oleh sebab itu, saat ini dilakukan berbagai macam pengembangan untuk melakukan integrasi sistem salah satunya adalah melakukan integrasi dengan aplikasi SiRUP.

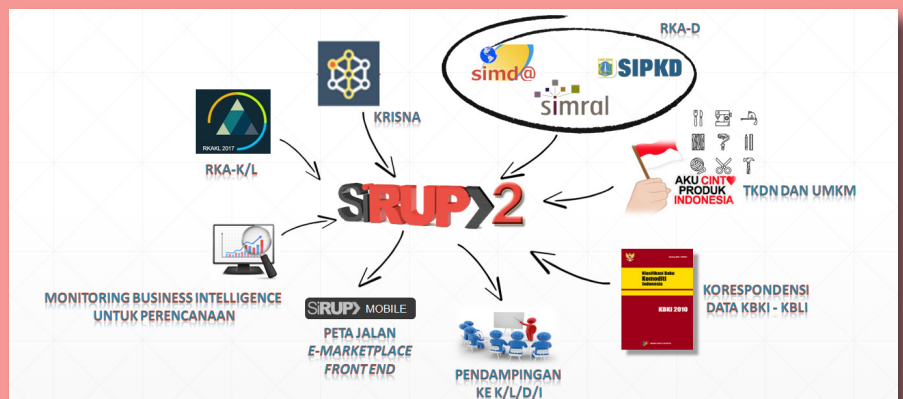


Skema Pengembangan Integrasi Sistem

Saat ini aplikasi SiRUP sudah digunakan oleh 34 Kementerian, 55 Institusi, 34 Provinsi, 417 Kabupaten, 92 Kota, 86 Agensi lainnya dan 401.356 Rekanan/Penyedia.

perjanjian antar lembaga untuk proses integrasi dan perbedaan hardware atau software yang digunakan di masing-masing instansi.

Saat ini, pengembangan yang



Kendala Pengembangan Integrasi Sistem

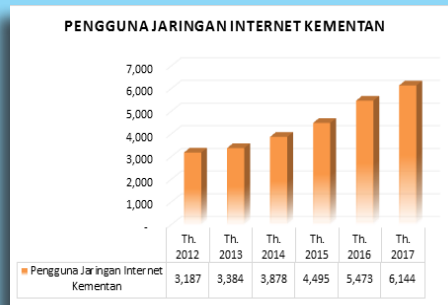
Skema pengembangan integrasi sistem yang akan dilakukan oleh LKPP nantinya akan mengaitkan mulai dari proses perencanaan, pembiayaan hingga pelaporan seperti tujuh ekosistem pengadaan yang sudah disinggung sebelumnya. Meskipun begitu, saat ini proses integrasi sistem tersebut masih mengalami kendala dari berbagi aplikasi yang akan diintegrasikan. Kendala tersebut muncul disebabkan belum adanya MOU atau

sudah dilakukan oleh LKPP terkait kendala yang muncul pada tahun sebelumnya adalah, pengguna terutama di pusat kesulitan untuk menginput dan menyerahkan dana Dekonsentrasi. Dipengembangan proses input dana Dekonsentrasi yang dilakukan satu persatu secara manual, dengan aplikasi SiRUP Versi 2.2 dapat dilakukan dengan proses unggah dari file yang diexport dari aplikasi RKAKL Kementerian Keuangan. (Lilik)

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KEMENTERIAN PERTANIAN

Mengacu kepada Inpres No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK yang meliputi (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; (2) pemanfaatan kemajuan TIK agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara.

Dari tahun ketahun, pemanfaatan TIK Kementerian Pertanian semakin meningkat, salah satunya terlihat dari peningkatan user/pengguna jaringan Internet Kementan (Gambar 1).



Gambar 1. Pengguna Jaringan Internet Kementan

Oleh sebab itu harus dipastikan efisiensi penggunaan sumber daya dan pengelolaan risiko TIK dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kementerian Pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka ditetapkanlah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan TIK di Kementerian Pertanian.

Peraturan ini berisi tentang infrastruktur TIK, nama domain dan subdomain, aplikasi, data dan informasi, portal web, email, dan tata kelola (Diagram 1).

INFRASTRUKTUR TIK

Pada bab ini menjelaskan tentang pengamanan dan perlindungan aset informasi untuk menjamin kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*) dan ketersediaan (*availability*) agar selalu terjadi dan terpelihara dengan baik. Aset Informasi meliputi seluruh data/dokumen/informasi sebagaimana diatur dalam klasifikasi informasi yang berlaku; sedangkan piranti lunak, meliputi aplikasi, sistem informasi, sistem basis data dan alat bantu (*tool/s*) aplikasi. Aset fisik meliputi perangkat komputer, perangkat jaringan dan komunikasi, media penyimpanan (*storage*), media lepas pasang (*removable media*) dan perangkat pendukung (*peripheral*). Sedangkan aset tak berwujud (*intangible*), meliputi pengetahuan, pengalaman, keahlian, citra dan reputasi.



Gambar 2. Diagram Permentan 51 Tahun 2016

Data center Kementerian Pertanian dikelola oleh Pusdatin. Layanan data center yang disediakan meliputi penyediaan fasilitas pusat data (*data center*), penempatan (*hosting*) portal web dan aplikasi berbasis web, sistem pencadangan (*backup*) untuk aplikasi e-Government, infrastruktur dan sistem keamanan pusat data (*data center*).

NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Nama Domain resmi Kementerian adalah pertanian.go.id yang dikelola oleh Pusdatin. Subdomain dapat diberikan kepada Unit Organisasi dan Unit kerja di Kementan (setjen.pertanian.go.id), Pelayanan publik di Kementan (perizinan.pertanian.go.id), Kegiatan layanan di Kementan (eproposal.pertanian.go.id) dan Aplikasi berbasis web (monevsms.pertanian.go.id, sig.pertanian.go.id, dll).

Penamaan Subdomain merupakan singkatan nama atau akronim dari nama resmi instansi, sesuai dengan nomenklatur pelayanan public, nama kegiatan (hps.pertanian.go.id, bkp.pertanian.go.id) atau aplikasi berbasis web (aplikasi3.pertanian.go.id/simasn).

DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi dalam penyelenggaraan e-Government wajib disediakan oleh masing-masing unit organisasi Kementan. Data dan informasi harus memenuhi kaidah struktur data, interoperabilitas, kebaruan,

keakuratan, kerahasiaan, dan keamanan informasi. Data dan informasi harus dikelola dan dikumpulkan oleh unit organisasi (*wali data*). Data dan informasi harus dapat dimandatkan oleh seluruh unit organisasi dan harus dikoordinasikan dengan PPID Kementan.

PORTAL WEB

Portal web resmi Kementerian dikelola oleh Sekretariat Jenderal. Nama domain resmi portal web Kementerian adalah www.pertanian.go.id, Nama Domain Situs Web unit organisasi diletakkan di depan Nama Domain Kementerian menjadi Nama Subdomain sedangkan situs Web unit organisasi dikelola oleh unit organisasi masing-masing. Dalam mengembangkan Situs Web, unit organisasi harus berkoordinasi dengan Pusdatin

E-MAIL

Alamat surat elektronik resmi Kementerian menggunakan nama domain pertanian.go.id. Akun surat elektronik resmi Kementerian menggunakan alamat @pertanian.go.id. Surat elektronik Kementerian dikelola oleh Pusdatin. Surat elektronik Kementerian diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada Pusdatin.

TATA KELOLA

Pada bab tata kelola dijelaskan tentang tugas Pusdatin dan tugas unit organisasi.

Tugas Pusdatin

a. menyusun Cetak Biru (blue

print);

- b. menyusun standar manual peralatan, Interoperabilitas, dan keamanan sistem informasi;
- c. memfasilitasi unit kerja dalam pembangunan dan pengembangan sistem informasi pertanian;
- d. membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menyediakan data dan informasi untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. menyediakan infrastruktur teknologi informasi;
- g. membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi administrasi berdasarkan masukan proses kerja unit organisasi di Kementerian;
- h. mengkoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi yang melibatkan lebih dari satu unit organisasi;
- i. memfasilitasi dan mengelola Nama Subdomain Kementerian untuk Situs Web resmi unit organisasi;
- j. menyediakan menu unit organisasi pada portal web Kementerian sebagai sarana pendukung penyelenggaraan e-Government;
- k. melakukan evaluasi sistem informasi secara berkala.

Tugas Unit Organisasi

- a. melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan e-Government;
- b. menyusun rencana dan mengembangkan e-Government unit organisasi sesuai cetak biru (blue print) sebagaimana

- yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a;
- c. membina sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. menyediakan dan memutakhirkan data dan informasi;
 - e. menyediakan akses bagi sistem informasi lain;
 - f. menyediakan aplikasi spesifik;

- g. mengelola situs web unit organisasi

EVALUASI

Evaluasi e-Government di Kementerian dilakukan oleh Kepala Pusdatin secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Menteri. Evaluasi e-Government meliputi:

- a. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Nama Domain dan Subdomain Kementerian;
- c. Aplikasi;
- d. Data dan informasi;
- e. Portal web Kementerian;
- f. Surat elektronik (e-mail) Kementerian; dan
- g. Tata kelola. ( yenni)

MENYIKAPI DENGAN BIJAK MEDSOS

Kemajuan teknologi dewasa ini telah banyak membuat perubahan fundamental kehidupan masyarakat. Alat-alat berteknologi tinggi (gadget) yang dulu dijadikan lambang kemapanan sosial kini telah menjadi sebuah kebutuhan berjejer dengan sandang, pangan dan papan. *Saking* pentingnya, banyak orang rela berganti-ganti *gadget* hanya untuk sekedar menikmati fitur terbaru dari sebuah produk, tentunya sangat menguntungkan para produsen barang-barang tersebut. Indonesia yang dikenal sebagai negara berkembang kini menjadi tujuan ekspor barang-barang ini, selain tumbuhnya masyarakat kelas menengah ternyata rakyat Indonesia memiliki sikap konsumtif yang luar biasa tinggi. Tentunya hal ini membawa banyak dampak positif, masyarakat kita menjadi mudah mendapat informasi yang bisa dimanfaatkan untuk banyak bidang seperti pendidikan, bisnis, olahraga, hiburan dll. Selain itu, ternyata kemajuan

teknologi juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertukar informasi dari hal-hal yang *sepele* sampai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Media sosial yang marak saat ini dijadikan tempat untuk menggalang opini masyarakat mengenai suatu masalah tertentu sehingga menyuburkan salah satu pilar demokrasi yaitu kebebasan berekspresi dalam masyarakat. Tetapi kita perlu ingat, segala sesuatu tercipta memiliki pasangan atau lawan, kemajuan teknologi selain memiliki dampak positif tentunya juga memiliki dampak negatif. Kemajuan teknologi yang begitu cepat dalam masyarakat membuat masyarakat kita menjadi latah. Masyarakat kita terlalu asyik dengan “mainan baru” sehingga kadang melupakan norma-norma dalam pergaulan. Tak jarang kita jumpai berita-berita yang bertujuan untuk mendapat respon di dunia maya dengan melakukan “provokasi”, bahkan kadang berita-berita palsu

atau *hoax* dijadikan “trending topic”. Selain itu banyak berita-berita yang masih simpang siur atau sengaja dipelintir oleh “oknum” untuk membentuk opini masyarakat juga sering terjadi. Pengguna sosial media yang mayoritas penggunaanya berpendidikan tinggi kadang terkecoh bahkan ikut larut dalam “berita” tersebut. Seharusnya pengguna sosial media melakukan kroscek terlebih dahulu tentang suatu berita agar tidak “termakan” berita yang tidak benar. Jika kita tidak bisa mengenali dengan jelas maka sudah seharusnya kita tidak serta merta mempercayai apa yang dibawa olehnya. Perlu meneliti secara seksama dan tidak tergesa-gesa sebuah berita menunjukkan kita tidak meremehkan sesuatu serta tidak mudah menghakimi suatu perkara. Apabila berita tersebut sensitif maka perlu hati-hati dalam menyikapinya agar tidak menimbulkan masalah tapi apabila berita tersebut bersifat gosip, omong kosong atau berita

yang tidak bermanfaat maka tidak perlu diselidiki, bahkan tidak perlu didengarkan karena hanya akan membuang waktu dan energi.

Media sosial merupakan hal yang tidak lazim untuk kita, khususnya masyarakat Indonesia. Dari yang muda hingga yang tua, usia dini hingga dewasa pun tak mau kalah dalam menggunakan media sosial. *Facebook, Twitter, Instagram, Blog*, adalah sederet beberapa nama media sosial yang banyak digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Jika ditanya apa tujuan mereka membuat media sosial tersebut, maka jawabannya pun beragam. Ada yang ingin terlihat eksis,

supaya tidak ketinggalan jaman, dan ada juga yang memiliki tujuan untuk berbagi informasi yang bermanfaat. Saya mengibaratkan media sosial itu seperti globe yang terdapat di gadget atau alat komunikasi kita. Dimana segala apapun yang kita inginkan, baik suatu informasi maupun sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam internet yang tercakup dalam media sosial. Pada dasarnya, sebagai manusia yang bijak, tentu kita harus pandai dalam mengolah informasi dan mengetahui dampak serta pengaruh media sosial kepada diri kita. Salah satunya adalah informasi mengenai gerakan radikalisme yang beredar

luas dikalangan kita. Lalu, bagaimana sikap kita dalam menghadapi informasi-informasi yang bersifat membelok di dalam media sosial tersebut?

1. **Memilah informasi** yang didapat.
2. **Mencari kebenaran** mengenai informasi yang didapat.
3. **Membandingkan isi berita** atau informasi yang di dapat dengan informasi yang ada di sumber berita lainnya.
4. **Tidak mudah terpengaruh** dengan judul atau isi berita yang didapat.
5. **Berdiskusi** dengan lingkungan sekitar (terutama keluarga) agar tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif.

( Dhanang)

WORKSHOP HASIL SURVEI METODE UBINAN PADI JAJAR LEGOWO

Dewasa ini telah diperkenalkan berbagai teknologi tanam budidaya padi, antara lain budidaya sistem tanam benih langsung (Tabela), sistem tanam tanpa olah tanah (TOT), sistem tanam padi yang tumbuh lagi setelah induknya dipotong/ Salinan Benih ibu (Salibu), maupun sistem tanam Jajar Legowo (JARWO). Pengenalan dan penggunaan sistem tanam tersebut disamping bisa mendapatkan pertumbuhan tanaman yang optimal juga ditujukan untuk meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Pada tahun 2015 - 2019 upaya peningkatan produksi padi diarahkan pada kegiatan peningkatan produktivitas (intensifikasi)

dan kegiatan perluasan areal tanam (ekstensifikasi) melalui penerapan teknologi tanam Jajar Legowo.

Seiring dengan penerapan teknologi tanam Jajar Legowo dalam upaya peningkatan produksi padi, maka Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) bersama Balai Besar Penelitian Padi Badan Litbang – Kementerian Pertanian, mengembangkan studi ubinan padi sistem tanam Jajar Legowo menggunakan metode ubinan reguler (2,5 m x 2,5 m), ubinan modifikasi, ubinan khusus untuk Jajar Legowo dan ubinan dengan menggunakan ajir. Kegiatan survei ini dilakukan guna : Menguji berat padi estimasi

(kg) hasil ubinan dengan berat padi sebenarnya pada *unit square (true value)* yang sama (Hipotesis: Berat Estimasi VS *True Value* tidak berbeda). Menguji berat padi hasil estimasi dan *true value* pada masing-masing plot ubinan dengan alat timbangan dacin dan digital, hipotesis: Dacin vs Digital tidak berbeda). Menguji alat ubinan Reguler, Modifikasi, Jarwo dan Ajir pada sistem tanam Jarwo 2:1, 4:1 dan 6:1 dengan alat ubinan Reguler pada sistem tanam Tegel (Kontrol), hipotesis: a. Ubinan Jarwo VS Kontrol ada beda, b. Antar Jarwo tidak berbeda. Menguji alat ubinan Reguler, Modifikasi, Jarwo dan Ajir pada sistem tanam Jarwo 2:1, 4:1 dan 6:1, hipotesis: Hasil

ubinan berbagai alat yang diuji pada berbagai sistem tanam Jarwo tidak berbeda

Workshop hasil Survei Metode Ubinan Jajar Legowo tahun 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2017 di Hotel Sensa Bandung yang dihadiri BPS dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Departemen Statistika IPB, Direktorat Serealia Ditjen Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, BB Padi Badan Litbang Pertanian serta seluruh tim survei dari Pusdatin. Dalam sambutan yang disampaikan Kepala Bidang Data Komoditas yang mewakili Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kegiatan survei ini dilakukan guna mencari metode yang sesuai untuk mengukur produktivitas padi, baik yang ditanam secara tegel maupun Jajar Legowo, sehingga akan memudahkan petugas baik dari sisi teknis pengubinan, maupun alat yang dibawa saat melakukan pengubinan. Kegiatan survei dilaksanakan atas kerjasama dengan BB Padi Badan Litbang Pertanian yang menyampaikan materi tentang Rekayasa Teknik Tanam Padi Jajar Legowo. Beberapa informasi penting yang disampaikan oleh BB Padi melalui pemaparan makalah sesi pertama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penelitian sistem tanam Jajar Legowo telah dikembangkan oleh BBPadi sejak tahun 1993 – 1998. Para peneliti mengkaji sistem tanam padi dengan cara mengurangi

jumlah baris tanaman (Jarwo). Hasil penelitian memperlihatkan sistem tanam jajar legowo dapat meningkatkan produksi yang lebih tinggi daripada SRI maupun tegel, selain itu tanaman juga memiliki performa paling sehat tidak terserang penyakit dan efek emisinya paling rendah. Berdasarkan fakta penelitian yang telah dilakukan selama kurun waktu tersebut, selanjutnya pada tahun 1998 Jajar Legowo resmi direkomendasikan sebagai komponen PTT.

2. Seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan hasil dari sistem tanam sebelumnya, saat ini BB Padi mulai mengembangkan sistem tanam padi yang disebut dengan Jarwo Super yang memiliki ciri-ciri:
 - a) Penggunaan varietas unggul baru
 - b) Penggunaan benih bermutu dan bibit sehat,
 - c) Penggunaan Sistem Tanam Jarwo
 - d) Penyiapan lahan optimal
 - e) Penanaman bibit muda (15 hari)
 - f) Pengaturan cara tanam
 - g) Pemberian kompos atau bahan organik
 - h) Penggunaan pupuk berdasarkan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman
 - i) Pengaturan pengairan secara benar
 - j) Perbaikan penanganan panen dan pasca panen
3. Teknologi budidaya padi yang dikembangkan di BBPadi dengan sistem Jarwo Super tersebut

memberikan dampak positif di antaranya: a) kekurangan hasil bisa ditekan hingga 7%, dan b) produktivitas rata-rata meningkat menjadi sebesar 10,6 ton/hektar. Pada tahun 2017 teknologi sistem tanam Jarwo Super direplikasi di 11 BPTP (1 BPTP seluas 10.000 hektar).

4. Walaupun demikian, pada implementasi penerapan sistem tanam padi Jarwo di tingkat petani masih ditemukan kendala, di antaranya: a) kebutuhan benih lebih banyak, b) tenaga kerja lebih tinggi, dan c) biaya tanam lebih besar. Namun demikian menurut BBPadi, kendala tersebut dapat diatasi dengan solusi penerapan mekanisasi pertanian dan penanaman skala luas berbentuk korporasi.
5. Informasi lain dari pemaparan BBPadi yaitu sistem tanam jajar legowo akan memiliki respon yang berbeda antar varietas, sehingga disarankan untuk wilayah dengan karakteristik khusus seperti lahan pasang surut harus dipilih varietas tertentu baru kemudian ditanam dengan sistem Jarwo.



Foto : Presentasi dari BB Padi Ir. Lalu M Zarwazi, MSI beserta Dr.Ir.Ana Astrid, MSI (Pusdatin) dan Dr.Kadarmanto (BPS)

Pada Sesi ke 2, disampaikan hasil penelitian dari sisi karakter Agronomis Inpari 23 dan Inpari 24,

dimana varietas ini merupakan varietas padi yang digunakan pada saat survei di Kebun penelitian BB Padi Sukamandi, Subang Jawa Barat dengan sistem tanam Jajar Legowo 2:1, 4:1 dan 6:1 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Inpari 23 dan inpari 24 terbukti mempunyai respon yang berbeda dari sistem tanam Jarwo yang dicoba. Dimana sistem tanam legowo dengan konsep penambahan populasi tanaman akan memberikan dampak penurunan jumlah anakan per rumpun, namun jika dikonversikan dalam skala luasan tertentu maka jumlah anakannya tetap lebih banyak.
 2. Sistem tanam legowo hanya signifikan menurunkan jumlah anakan per rumpun, namun tidak signifikan mempengaruhi komponen hasil lainnya seperti jumlah gabah per malai maupun bobot 1000 butir. Oleh karena itu bila sistem Jarwo diterapkan secara tepat akan dapat mendukung peningkatan hasil.
 3. Penerapan legowo lebih cocok dipadukan dengan varietas dengan tipe anakan sedang hingga banyak, namun kurang sesuai pada tipe anakan sedikit.
- Pemaparan hasil uji alat ubinan pada sistem tanam Jajar Legowo 2:1, 4:1 dan 6:1 oleh Pusdatin Kementan diperoleh simpulan sebagai berikut:
1. Hasil uji statistik t berpasangan untuk penimbangan padi (kg/unit square) hasil estimasi per dalam masing-masing *unit square* (ukuran 5 m x 5 m) dengan hasil penimbangan sebenarnya pada satu *unit square* (*true value*) menunjukkan hasil yang sama. Artinya semua jenis alat ubinan yang dipilih dalam penelitian memiliki akurasi yang baik dan layak digunakan untuk mengubin padi jarwo. Namun perlu dipilih satu alat ubinan agar lebih efisien.
 2. Hasil uji statistik t untuk penggunaan alat timbangan dacin dan digital memiliki akurasi yang sama untuk menimbang berat padi per *unit square*. Untuk pengadaan ke depan, direkomendasikan untuk memilih alat timbangan digital karena harganya lebih murah dan lebih ringan dibandingkan alat timbangan dacin. Selain itu timbangan digital juga memiliki tingkat akurasi tinggi.
 3. Hasil uji LSD untuk pengujian 4 alat ubinan pada sistem tanam Jarwo 2:1, 4:1 maupun 6:1, membuktikan ada perbedaan produktivitas antara berat padi (kg/unit square) yang ditanam dengan sistem tanam Jarwo dibandingkan dengan sistem Tegel. Hal ini memperkuat penelitian sebelumnya bahwa sistem Jarwo menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem tegel.
 4. Hasil diskusi menanggapi kesimpulan hasil penelitian butir 1, BPS menginformasikan pada beberapa tahun sebelumnya memiliki ide untuk melakukan pengukuran ubinan petak penuh khusus untuk padi yang ditanam sistem Jarwo.

Akan tetapi karena biaya yang dibutuhkan sangat besar akhirnya ide untuk melakukan ubinan seluruh petak tidak dilaksanakan. Oleh karena itu diharapkan dari kegiatan ini dapat menentukan satu alat ubinan yang dapat digunakan untuk tanam tegel maupun tanam jarwo.

5. Ide untuk menerapkan sampling ubinan jarwo telah dikemukakan beberapa tahun yang lalu bahkan saat ini pun masih terus diusulkan. Namun keinginan tersebut belum terwujud, karena kesulitan memperoleh data CPCL yang akan panen pada subround mendatang. Untuk sementara waktu untuk mengakomodasi sistem tanam jarwo dalam perhitungan produktivitas padi maka pengisian pada keterangan formulir ubinan khususnya untuk ubinan yang terambil berupa sistem Jarwo harus dikawal dengan baik dan diperhitungkan pada perhitungan produktivitas nasional.



Foto : Dr.Ir.Budi Waryanto, MSi pemateri hasil survei metode alat ubinan padi Jarwo

6. Analisis lanjutan perlu dilakukan untuk menguji jenis ubinan yang terbaik, artinya hasil estimasi produksi tidak berbeda nyata dengan hasil yang sebenarnya (*true Value*).

7. Alat ubinan reguler dan ajir konsisten menghasilkan angka yang tidak berbeda nyata untuk hasil estimasi dan *true value*. Saran dari BB Padi jika ubinan reguler tetap digunakan untuk ubinan tegel, maka untuk sistem tanam jarwo dapat menggunakan ajir.

Pelaksanaan secara teknis di lapang alat pengganti ajir/ bilah bambu dapat dipilih pipa ubinan dan tali rafia sebagai pembatas. Untuk itu perlu disusun mekanisme operasional lebih lanjut sebelum dipilih.

8. Selain itu untuk menyimpulkan satu alat ubinan yang

dapat dipakai baik untuk tegel maupun jarwo, akan dilakukan penelitian menggunakan pendekatan modelling untuk mencari faktor koreksi sehingga tidak perlu mengadakan alat ubinan dalam volume banyak.

( Hanny Mulianny).

WORKSHOP DATA DAN INFORMASI EKONOMI PERTANIAN TAHUN 2017

Pada tanggal 30 Oktober 2017, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) khususnya Bidang Data Non Komoditas mengadakan Workshop Data dan Informasi Ekonomi Pertanian di Hotel Cipta Mampang, Jakarta Selatan. Workop ini di hadiri oleh 50 peserta dari perwakilan eselon I Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik.

Acara Workshop Data dan Informasi Ekonomi Pertanian dibuka oleh Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Kapusdatin) Dr. Ir. Suwandi, M.Si. Dalam arahnya Kapusdatin mengatakan bahwa data-data di Sub Bidang Data Ekonomi Pertanian sebaiknya disampaikan ke publik agar masyarakat luas dapat mengetahui data-data ekonomi pertanian seperti PDB (Produk Domestik Bruto), NTP (Nilai Tukar Petani), NTUP (Nilai Tukar Usaha Petani), ekspor impor, konsumsi pangan, IPM (Indek Pembangunan Manusia), harga pangan dan sebagainya. Selain itu Kapusdatin mengharapkan fungsional statistisi membuat modeling ekonomi pertanian

dengan menggunakan data-data yang tersedia sehingga kita dapat melihat tren yang terjadi saat ini di bidang pertanian.

Acara workshop ini dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama menghadirkan 2 narasumber yaitu Dr. M. Luthful Hakim (Kepala Bidang Data Non Komoditas – Pusdatin) memaparkan Ketersediaan Data dan Informasi Ekonomi Pertanian dan Ir. Sabarella, M.Si (Fungsional Statistisi) memaparkan Sistem Monitoring Ketahanan Pangan. Kabid Data Non Komoditas mengawali pemaparannya dengan

seperti data terkini ekonomi pertanian, buku statistik makro sektor pertanian, statistik harga komoditas pertanian, statistik konsumsi, database ekspor impor, NTP dan PDB, database konsumsi, database harga komoditas pertanian, analisis konsumsi dan neraca komoditas pertanian, analisis perdagangan komoditas pertanian, pedoman/ metoda pengumpulan data ekonomi pertanian.

Berikut dijelaskan secara rinci ketersediaan data dan informasi ekonomi pertanian di Sub Bidang Data Ekonomi Pertanian sebagai berikut.

Kegiatan	Jenis Data	Periode	Ketersediaan Data	Level
Indikator Data Makro	Ekspor Impor Komoditas Pertanian	Bulanan	2003- Sept 2017	Per Kode HS (Nasional)
	Produk Domestik Bruto (PDB)	Triwulanan	2000-Tw.II 2017	Nasional
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Tahunan	2006-2016	Provinsi
	Indeks Harga Konsumen (IHK)- Inflasi	Bulanan	2010- Sept 2017	Nasional
	Upah Buruh Tani	Bulanan	2008- Sept 2017	Nasional
	Investasi PMDN dan PMA	Triwulanan	2010- Tw.II 2017	Nasional
	Kredit Pembiayaan Pertanian	Bulanan	2008- Juli 2017	Nasional
Data Konsumsi Sektor Pertanian	Kurs Rupiah	Bulanan	2004-2017	Nasional
	Konsumsi Rumah Tangga (SUSENAS)	Tahunan	1993, 1996, 1999, 2002-2016	Nasional
	Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tahunan	1993-2016	Nasional
Data Harga Komoditas Pertanian	Struktur Ongkos Usaha Tani	Tahunan	2013	Provinsi, Nasional
	Harga eceran di Ibukota Provinsi	Harian	2010- Sept 2017	Nasional
	Harga Grosir Provinsi	Bulanan	2009- Sept 2017	Provinsi
	Harga Produsen di Kabupaten	Mingguan	2013- Sept 2017	Provinsi
	Harga Gabah di tingkat petani dan penggilingan	Bulanan	2013- Sept 2017	Kabupaten
Data Harga Komoditas Pertanian	Harga Konsumen Pedesaan	Bulanan	2002- Sept 2017	Nasional, Provinsi
	Harga Produsen Pedesaan	Bulanan	2008-2016	Nasional, Provinsi
	Harga dan Pasokan Beras di Pasar Induk Cipinang	Bulanan	2008-2016	Nasional, Provinsi
		Harian	2012- Okt 2017	Nasional

menyampaikan ketersediaan data dan publikasi yang telah dihasilkan oleh Sub Bidang Data Ekonomi Pertanian

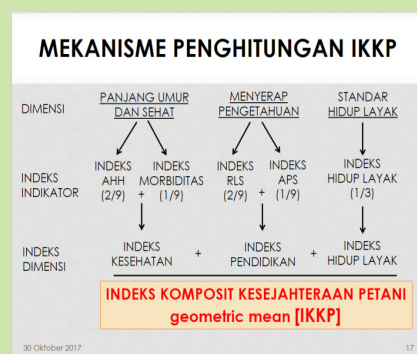
Narasumber kedua memaparkan 3 (tiga) komponen ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, distribusi (akses

pangan atau keterjangkauan) dan terakhir pemanfaatan pangan (konsumsi). Ketahanan pangan yang dimonitoring adalah konsumsi beras. Beras merupakan pangan pokok penduduk Indonesia dan juga sebagai sumber utama karbohidrat dan kalori serta mempunyai bobot yang tinggi dalam inflasi. Andil beras terhadap inflasi umum September 2017 sebesar 0,13. Konsumsi beras per kapita (Susenas) tahun 2010 sebesar 100,75 kg menjadi 99,76 kg tahun 2016 atau menurun 0,13% per tahun, namun jumlah penduduk meningkat sehingga kebutuhan domestik beras Indonesia selalu meningkat setiap tahun. Perlu adanya ketersediaan data dan informasi ketahanan pangan yang lengkap dan mutakhir/*up to date* (harian) seperti saat ini Pusdatin sedang melakukan uji coba pengembangan metode pengumpulan data pasokan dan penjualan beras (pasokan, penjualan dan stok) melalui penyusunan Sistem Monitoring Ketahanan Pangan.

Pada sesi kedua workshop ini, dilanjutkan dengan narasumber ketiga yaitu Wynandin Imawan memaparkan Indeks Komposit Kesejahteraan Petani (IKKP) dan Abiyadun, SE, MM memaparkan Survei Perdagangan Lintas

Batas. Wynandin Imawan menyampaikan materi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengukur kesejahteraan petani harus melihat apa saja yang di jadikan untuk mengukur kesejahteraan kualitatif (tidak mudah dipahami, indeks kebahagiaan, orang punya pemahaman berbeda tergantung ekspektasi masing-masing) dan kuantitatif (mudah mengukur dan dipahami). Ukuran kesejahteraan petani selain Nilai Tukar Petani (NTP) dapat juga digunakan Data Makro (tunggal bermakna multi dimensi), data kemiskinan, pendapatan, PDB/kapita dan IPM (dapat mengukur kualitas hidup dan kesejahteraan). Metodologi yang di gunakan adalah petani sebagai sampel dengan menggunakan defense petani bekerja dan berusaha di sektor pertanian, data yang di gunakan bersumber dari SUSENAS, BPS. Untuk cakupan pengukurannya adalah provinsi karena data per kabupaten

sampelnya tidak cukup. Berikut mekanisme penghitungan IKKP. Narasumber terakhir memaparkan perdagangan di lintas batas negara. Dalam hal ini yang melatarbelakangi survei perdagangan lintas batas adalah rekomendasi *United Nations Statistics Division* (UNSD) dalam *International Merchandise Trade Statistics* (IMTS) 2010. Semangat membangun wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Indonesia periode saat ini, seperti ditetapkan dalam butir ketiga Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perlu adanya kebijakan perekonomian yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan sehingga data perdagangan lintas batas sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan pembangunan bidang pertanian. PakAbiyadunjugamenambahkan perlunya peningkatan kualitas data ekspor dan impor yang ada saat ini sekaligus memenuhi standar rekomendasi dari International Merchandise Trade Statistics (IMTS) dengan menambah cakupan data di luar data kepabeanaan, khususnya di wilayah perbatasan secara berkesinambungan. ( Yani)



PROSPEK KEDELAI 5 TAHUN KE DEPAN

Kacang kedelai merupakan jenis kacang yang dapat dengan mudah ditemui di Indonesia. Olahan kacang kedelai yang berupa tahu, tempe, atau susu kedelai menjadi makanan

familiar di kalangan rumah tangga di Indonesia apalagi di kalangan para vegetarian, sebab kedelai mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan sebagai zat protein penting.

Selain itu kacang kedelai juga mengandung senyawa fitokimia yang memiliki banyak manfaat sehat. Nilai plus yang lain adalah harga tahu dan tempe relatif murah dibandingkan

sumber protein hewani, seperti telur atau daging. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Rata-rata kebutuhan kedelai Indonesia per tahun tidak pernah bergeser dari angka 3 juta ton. Ironisnya pemenuhan kebutuhannya sekitar 70% dipenuhi dari impor. Hal ini terjadi karena produksi kedelai dalam negeri tidak mampu mencukupi permintaan produsen tempe dan tahu.

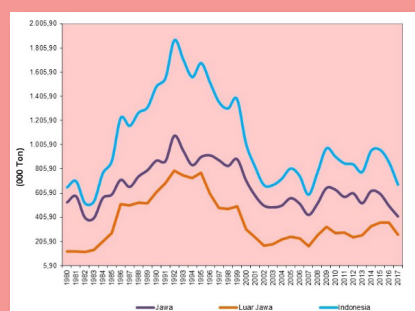
Peningkatan produksi kedelai baik dari kuantitas maupun kualitas terus diupayakan oleh pemerintah. Upaya dilakukan dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Pengembangan komoditas kedelai untuk menjadi unggulan sub sektor tanaman pangan perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk melihat prospek pengembangan komoditas kedelai di Indonesia dan keragaannya di dunia global, berikut ini disajikan perkembangan komoditas kedelai serta hasil proyeksi produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia untuk periode lima tahun ke depan.

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (PUSDATIN) pada tahun 2017 telah melakukan analisis peramalan komoditas kedelai dengan menggunakan metode statistik peramalan untuk indikator produksi dan konsumsi dengan Persamaan Simultan.

Keragaan data Kedelai (2013-2017)

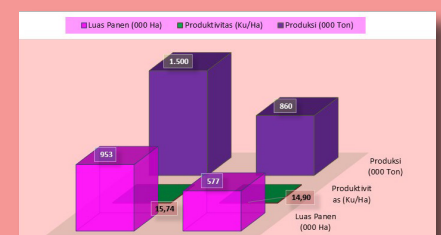
Produksi kedelai nasional lima tahun terakhir (2013-2017) turun rata-rata 4,15% per tahun.

Penurunan cukup signifikan diperkirakan terjadi tahun 2017 sebesar 29,90%, dari produksi tahun 2016 sebesar 859,65 ribu ton menjadi 675,16 ribu ton di tahun 2017. Penurunan produksi merupakan eksekusi dari berkurangnya luas panen kedelai tahun 2017 sebesar 27,37% atau seluas 130,99 ribu hektar, dari tahun 2016 sebesar 576,99 ribu hektar menjadi 446,00 ribu hektar di tahun 2017. Meskipun produktivitas kedelai tahun 2017 meningkat 1,61%, namun tidak memberikan kontribusi yang nyata terhadap produksi. Lima tahun terakhir produktivitas kedelai mengalami stagnasi, meningkat tipis 0,52% per tahun. Penurunan produksi kedelai nasional menurut Ketua Dewan Kedelai Nasional, Benny Kusbini, disebabkan oleh tiga hal utama, pertama terjadinya la nina, kedua luas lahan kedelai tidak bertambah, dan ketiga harga kedelai masih kurang menarik bagi petani. Penurunan produksi kedelai nasional lima tahun terakhir merupakan dampak dari penurunan produksi di Jawa hingga 8,83% per tahun. Meskipun produksi di Luar Jawa meningkat 4,66 per tahun tetapi peningkatan tersebut tidak dapat mendongkrak angka produksi secara nasional (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Perkembangan Produksi Kedelai di Indonesia, 1980 – 2017

Sasaran produksi kedelai tahun 2016 dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan sebesar 1,5 juta ton tidak tercapai, karena capaian produksi hasil Angka Tetap tahun 2016 hanya separuhnya atau 57,31%, yakni sebesar 860 ribu ton. Meskipun sudah ditunjang oleh pencapaian produktivitas yang mendekati target yakni sebesar 14,90 ku/ha atau 94,68% dari target 15,74 ku/ha. Namun capaian produksi masih tetap relatif rendah, karena capaian luas panen produksi hanya 60,53% atau seluas 577 ribu hektar dari target 953 ribu hektar (Gambar 3.2).



Gambar 3.2. Perbandingan Sasaran dan ATAP Kedelai Tahun 2016

Proyeksi Produksi 2017-2021.

Angka produksi kedelai merupakan hasil perkalian luas panen dengan produktivitas per hektar. Pendugaan proyeksi produksi dan variabel yang berpengaruh menggunakan Persamaan Simultan berdasarkan data series tahunan.

Hasil proyeksi luas panen kedelai tahun 2018 diperkirakan meningkat signifikan 23,74% atau 105,88 ribu hektar menjadi 551,89 ribu hektar dari angka ARAMI2017 sebesar 446,01 ribu hektar. Proyeksi ini diperkirakan akan tercapai karena pada tahun 2017 Ditjen Tanaman Pangan telah memetakan lahan pengembangan tanam kedelai seluas 770 ribu hektar yang disertai dengan strategi

pencapaiannya. Lahan tersebut terdiri atas Lahan Perhutani 100 ribu hektar, Lahan Kering/APL 300 ribu hektar, Lahan tadah Hujan 200 ribu hektar, Lahan Rawa/BJA 10 ribu hektar, dan Peningkatan Indeks Pertanaman 160 ribu hektar. Proyeksi luas panen hingga lima tahun ke depan (2017-2021) diperkirakan akan meningkat tipis, rata-rata 0,27% per tahun. Namun peningkatan luas panen kedelai tersebut masih di bawah capaian tahun 2016 sebesar 576,99 ribu hektar.

Tabel 1. Proyeksi Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Kedelai Indonesia, 2017–2021

Tahun	Luas Panen (Ha)	Pertumbuhan (%)	Produktivitas (kg/ha)	Pertumbuhan (%)	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)
2016	576.986,90		14,90		859.653	
2017*)	446.010,00	-22,70	15,14	1,61	675.166	-21,49
2018**)	551.888,70	23,74	15,45	2,05	864.111	27,59
2019**)	549.935,32	-0,35	15,61	1,02	893.294	3,39
2020**)	553.317,89	0,62	15,77	1,05	908.293	1,69
2021**)	553.656,71	0,06	15,94	1,07	931.569	2,55
Rata-rata		0,27		1,36		2,83

Keterangan : *) ARAM I

**) Angka Proyeksi Pusdatin

Pada periode ini produktivitas kedelai diperkirakan cukup prospektif, karena akan terus meningkat rata-rata 1,36% per tahun. Tahun 2018 produktivitas akan tumbuh 2,05%, menjadi 15,45 ku/ha dari tahun 2017 sebesar 15,14 ku/ha. Upaya peningkatan produktivitas merupakan harapan meningkatkan produksi kedelai di tahun-tahun mendatang. Terutama untuk wilayah sentra produksi di Jawa, mengingat ekstensifikasi lahan tidak memungkinkan diterapkan di Pulau Jawa. Peningkatan pada dua faktor utama tersebut memberikan efek positif pada produksi kedelai lima tahun mendatang, rata-rata per tahun naik 2,83%. Produksi kedelai tahun 2018 diperkirakan meningkat signifikan sebesar

27,98% atau 188,94 ribu ton, menjadi 885,58 ribu ton dari tahun 2017 sebesar 675,17 ribu ton. Tahun 2021 produksi kedelai diperkirakan mencapai 931,57 ribu ton (Tabel 1).

Proyeksi Konsumsi (2017-2021).

Proyeksi konsumsi kedelai dihitung berdasarkan data ketersediaan konsumsi, selanjutnya dilakukan proyeksi sampai lima tahun ke depan (2017-2021). Total konsumsi merupakan hasil perkalian konsumsi per kapita per tahun dikalikan data proyeksi jumlah penduduk tengah tahun yang diterbitkan BPS.

Tabel 2. Proyeksi Konsumsi Kedelai Tahun 2017 – 2021

Tahun	Konsumsi (Kg/kap/thr)	Pertumbuhan (%)	Jumlah Penduduk (Jwa)	Pertumbuhan (%)	Konsumsi Nasional (Ton)	Pertumbuhan (%)
2016	11,01		258.705.000		2.848.342,05	
2017*)	11,19	1,66	261.890.900	1,23	2.931.266,28	2,91
2018**)	11,52	2,93	265.015.300	1,19	3.053.082,26	4,16
2019**)	11,65	1,13	267.974.200	1,12	3.121.953,02	2,26
2020**)	11,65	-0,03	271.066.400	1,15	3.156.947,72	1,12
2021**)	11,56	-0,73	273.984.400	1,08	3.167.753,84	0,34
Rata-rata		0,99		1,15		2,16

Keterangan : *) Angka Proyeksi Pusdatin

**) Angka Proyeksi Pusdatin

Konsumsi kedelai per kapita tahun 2017-2021 diperkirakan meningkat tipis, tidak sampai 1% hanya 0,99%. Lain halnya pada konsumsi kedelai nasional, meningkat 2,16% per tahun karena ditunjang oleh pertumbuhan penduduk 1,15% per tahun pada periode yang sama. Pada tahun 2018 konsumsi nasional kedelai diperkirakan menembus 3 juta ton, yakni sebesar 3,05 juta ton (Tabel 2).

Neraca Kedelai 2017-2021.

Setelah menghitung angka kebutuhan dan mempertimbangkan kemampuan produksi kedelai dalam negeri. Pada periode 2017-2021 diperkirakan akan terus terjadi pembengkakan

defisit kedelai di Indonesia pada kisaran 2,2 juta ton. Pada tahun 2017 diperkirakan kekurangan pasokan kedelai akan mencapai 2,26 juta ton, naik 13,45% dari tahun 2016. Peningkatan defisit ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun 2020, meskipun pada periode yang sama produksi kedelai diprediksi meningkat, namun laju pertumbuhan dan besaran produksi jauh lebih rendah dari laju konsumsi nasional dan besarnya. Pada tahun 2021 defisit pasokan kedelai diperkirakan mencapai 2,24 juta ton, turun 0,55% dari tahun 2020 yang mengalami defisit sebesar 2,25 juta ton (Tabel 3).

Tabel 3. Proyeksi Neraca Kedelai Tahun 2017 - 2021

Tahun	Konsumsi Nasional (Ton)	Pertumbuhan (%)	Produksi (Ton)	Pertumbuhan (%)	Surplus/Defisit (Ton)	Pertumbuhan (%)
2016	2.848.342		859.653		-1.988.689	
2017*)	2.931.266	2,91	675.166	-21,49	-2.256.100	13,45
2018**)	3.053.082	4,16	864.111	27,99	-2.188.971	-2,98
2019**)	3.121.953	2,26	893.294	3,39	-2.228.659	1,81
2020**)	3.156.948	1,12	908.293	1,69	-2.248.654	0,90
2021**)	3.167.753	0,34	931.569	2,55	-2.236.183	-0,55
Rata-rata		2,16		2,83		2,53

Keterangan : **) Angka Proyeksi Pusdatin

Kekurangan pasokan kedelai yang tetap bertahan sangat besar hingga 2 juta ton dari tahun ke tahun dipenuhi dari impor. Hal ini harus menjadi catatan tebal untuk perkembangan pertanian, jangan sampai Indonesia menjadi negara net impor kedelai beberapa tahun mendatang. Upaya peningkatan produksi yang sekarang sedang berlangsung, diharapkan tidak sekedar menjadi wacana namun menjadi program berkelanjutan. Sehingga beberapa tahun ke depan peningkatan produksi tercapai dan kedaulatan pangan terealisasi sehingga akan meminimalisir ketergantungan pada impor. ( Dyah)